

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Pembangunan (RPJMN) 2015-2019 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJPN) 2005-2025 adanya penekanan untuk membentuk kokohnya perekonomian Indonesia melalui tahapan pembangunan dan arah kebijakan ekonomi Indonesia dengan mengukuhkan pembangunan ekonomi secara keseluruhan adanya penekanan pada pencapaian daya saing ekonomi berlandaskan keunggulan SDA dan SDM Indonesia. Berdasarkan data World Bank, Indonesia memiliki pendapatan per kapita pada tahun 2015 USD 3.322,6 dan tahun 2021 sebesar USD 4,334,2 dengan ini, posisi Indonesia ada dalam kategori negara dengan penghasilan menengah. Saat ini, batas antara negara dengan penghasilan rendah dan tinggi terus mengalami pergerakan hal ini dikarenakan semakin tumbuhnya perekonomian global. Menurut UNDP yang dituangkan dalam *Human Development Report 2015*, negara dengan penghasilan tinggi mengalami ketimpangan distribusi pendapatan yang relatif lebih rendah 10 persen dibandingkan dengan negara yang berpenghasilan menengah dan rendah. Indonesia terus mengalami percepatan laju pertumbuhan, ini dibuktikan kesempatan kerja yang terus meningkat dengan demikian kemiskinan di Indonesia juga akan semakin berkurang dan mampu menghadapi tantangan dengan kuatnya perekonomian saat ini.

Untuk mencapai target dari yang ada di RPJPN dan RPJMN yaitu kokohnya perekonomian Indonesia, di era globalisasi saat ini diperlukan campur tangan negara lain dengan bentuk kerjasama. Bagi negara berkembang perdagangan internasional memainkan peranan penting sebagai representasi kemampuan memproduksi produsen dalam negeri (Subanti et al., 2019a). Menurut teori perdagangan internasional menjelaskan bahwa spesialisasi perdagangan berdasarkan keunggulan komparatif akan meningkatkan efisiensi dan produktivitas sebuah negara. Dengan keterbukaan perdagangan, negara berkembang tidak hanya mendapatkan transfer barang, jasa, dan sumber daya tetapi dengan juga mempengaruhi pembangunan (P.Todaro & C.Smith, 2009). Menurut (P.Todaro & C.Smith, 2009) negara berkembang lebih bergantung terhadap perdagangan dalam hubungan internasional hal ini disebabkan oleh perdagangan yang dilakukan oleh negara berkembang adalah transaksi barang dibandingkan dengan negara maju.

Oleh karena itu, pemerintah Indonesia sejak 2015, terus berupaya dan gencar meningkatkan keterbukaan perdagangan dengan berbagai kebijakan perdagangan bebas. Misalnya tahun 2017 menandatangani *ASEAN Trade in Goods Agreement (ATIGA)* dan *Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP)* pada 2020. Akan tetapi jauh sebelum ini, Indonesia telah bergabung dalam organisasi perdagangan internasional diantaranya *World Trade Organization (WTO)* dan *Asia Pacific Economic Cooperation (APEC)*, di sisi lain Indonesia banyak bergabung dengan organisasi dan kerjasama perdagangan bebas antar negara baik dalam lingkup ASEAN maupun secara global, seperti

ASEAN-Australia New Zealand Free Trade Area (AANFTA), ASEAN Free Trade Area (AFTA), dan Indonesia Japan Economic Partnership (IJEPA). Dengan semakin banyaknya Indonesia bergabung dan melakukan kerjasama dengan negara lain, perekonomian Indonesia terhitung mulai tahun 2015-2022 mengalami peningkatan ini ditunjukkan dengan pendapatan per kapita Indonesia tahun 2015 sebesar USD 3.322,6 dan tahun 2021 sebesar USD 4,334,2.

Akan tetapi meskipun pendapatan perkapita dan laju pertumbuhan Indonesia semakin meningkat, hal ini tidak dapat dirasakan oleh rakyat Indonesia secara menyeluruh. Disebabkan karena tingkat ketimpangan di Indonesia masih cenderung tinggi. Kesenjangan atau ketimpangan merupakan disparitas pendapatan antara golongan berpenghasilan tinggi dan berpenghasilan rendah (Todaro & Smith, 2003). Satu dari fenomena dan isu yang sering dialami negara sedang berkembang adalah kesenjangan pendapatan. Ketimpangan atau kesejangan pendapatan diukur dengan rasio gini, yang mana angka ini berkisar dari nol sampai satu. Semakin dekat dengan nilai nol maka semakin rendah ketimpangan di sebuah negara atau daerah dan sebaliknya semakin dekat angka satu maka ketidakmerataan semakin tinggi. Banyak negara sedang berkembang yang laju pertumbuhan tinggi tetapi pada kenyataannya tidak berdampak besar dan memberi manfaat bagi rakyat Indonesia (Kuncoro & Mudrajad, 1997). Ketika kesenjangan pada distribusi pendapatan tinggi maka akan berdampak pada laju pertumbuhan ekonomi yang semakin meningkat, ini disebabkan oleh jika dilakukan perbandingan antara tabungan Si Kaya dan Si Miskin, semakin tinggi rasio tabungan Si Kaya dapat menyebabkan aggregate saving rate

yang juga tinggi dan diiringi dengan meningkatnya penanaman modal dan pertumbuhan ekonomi (Michael.P & Smith, 2006).

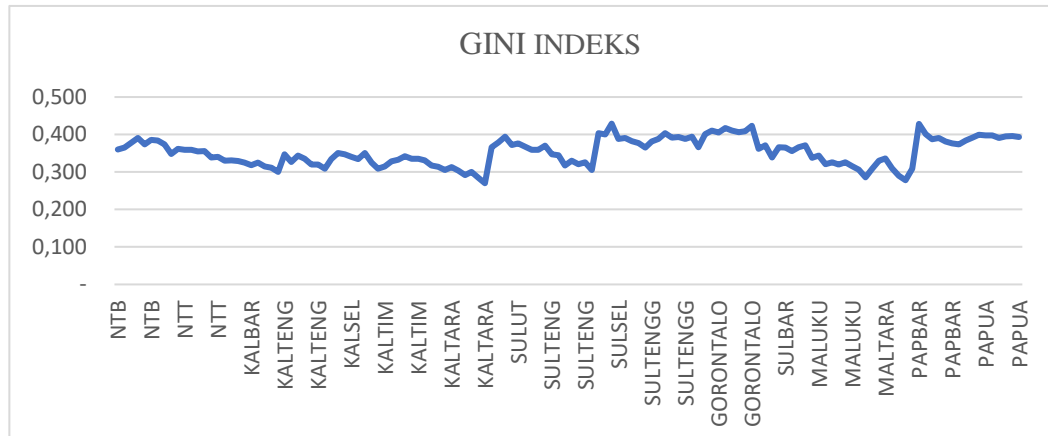
Sharma dalam (Wibowo, 2013) mengemukakan bahwa pertumbuhan ekonomi di negara-negara Asia Pasifik dan Asia Timur berhasil ditingkatkan dan berhasil menurunkan tingkat kemiskinan tetapi ketimpangan di negara tersebut semakin tinggi. Indeks Gini digunakan sebagai tolok ukur ketimpangan apabila semakin tinggi. Gini Indeks China yaitu 48,2 persen, Filipina dengan Gini Indeks 45 persen, dan Thailand 40 persen.

Sebagai negara maju dan bahkan negara adidaya dengan pakar ekonomi yang banyak, Amerika Serikat juga mengalami masalah ketimpangan pendapatan seperti negara berkembang. Ketimpangan tidak mampu diselesaikan meskipun dengan adanya kemajuan teknologi dan globalisasi, hal ini justru menyebabkan semakin tingginya ketimpangan yang berakibat membelah lapisan masyarakat antara yang kaya dan yang miskin. Menurut (Bahagijo et al., 2014) mengemukakan meskipun Amerika Serikat memiliki banyak miliarder dan orang-orang super-kaya di dunia, namun jumlah kelompok yang selama 25 tahun masih berpenghasilan rendah, sebesar seperempat dari populasi penduduk Amerika Serikat. Di sisi lain, dari 1 persen orang terkaya terus meningkat bahkan mencapai tiga kali lipat, dan menyumbang 20 persen terhadap kekayaan nasional. Kemajuan teknologi dan globalisasi justru salah satu penyebab ketimpangan.

Selama tiga dekade, dari 1982-2015, kontribusi wilayah Sumatera, Jawa, dan Bali sangat mendominasi menyumbang Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yaitu sekitar 80 persen dari total Produk Domestik Bruto (PDB) nasional, sedangkan untuk wilayah Kalimantan, Sulawesi, Papua, dan Maluku hanya berkontribusi sekitar 20 persen. Di Indonesia, ketimpangan pendapatan antar provinsi terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, rasio Gini pendapatan antar rumah tangga di Indonesia meningkat dari 0,399 pada 2015 menjadi 0,414 pada 2022. Secara spasial, Provinsi DKI Jakarta dan sejumlah provinsi di Pulau Jawa masih mendominasi perekonomian Indonesia. Peningkatan ketimpangan ini terjadi bersamaan dengan makin terintegrasinya perekonomian Indonesia ke dalam perdagangan global. Peningkatan ketimpangan terjadi bersamaan dengan ekspansi nilai perdagangan Indonesia dengan mitra dagang utama. Pangsa nilai ekspor-impor terhadap PDB Indonesia meningkat dari 34,7% pada 2015 menjadi 56,8% pada 2021.

Disparitas pembangunan antardaerah dalam jangka panjang dapat berdampak pada kehidupan sosial masyarakat. Ketidakmerataan antar daerah pun tercermin dari kurang lebih 122 kabupaten yang termasuk dalam kategori wilayah 3T. Di sisi lain, terjadi pula ketidakmerataan antara daerah pedesaan dan perkotaan. Ketimpangan pembangunan antara desa dan kota, serta antarkota, harus diselesaikan secara cepat sebagai pencegahan perpindahan dari desa ke kota yang berlebihan, yang nantinya menambah beban dan masalah sosial di daerah perkotaan. Ketidakmerataan tersebut berhubungan dengan distribusi

penduduk yang tidak diikuti dengan tersedianya sarana dan prasarana yang memadai. Upaya-upaya pembangunan yang lebih terkonsentrasi pada wilayah tertinggal merupakan sebuah keharusan untuk mengatasi tantangan ketimpangan dan kesenjangan pembangunan. Koefisien Gini untuk mengukur ketimpangan pendapatan menunjukkan variasi antar provinsi. Provinsi dengan industrialisasi dan pusat perdagangan yang maju cenderung memiliki Gini Indeks lebih tinggi. Berpindahnya masyarakat dari desa ke kota tanpa dibarengi penyediaan lapangan pekerjaan memicu urbanisasi kumuh di beberapa provinsi. Ketimpangan antar provinsi dipengaruhi oleh akses pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan teknologi yang berbeda antar daerah.



Sumber: Badan Pusat Statistik (2023)

Gambar 1. 1

Perkembangan Indeks Gini di 17 Provinsi di Indonesia 2015-2022

Dari grafik di atas, Gini Index dari 17 provinsi di Indonesia yang merupakan parameter dari ketimpangan pendapatan menunjukkan bahwa ketimpangan pendapatan di 17 provinsi dari tahun ke tahun mengalami kenaikan meskipun

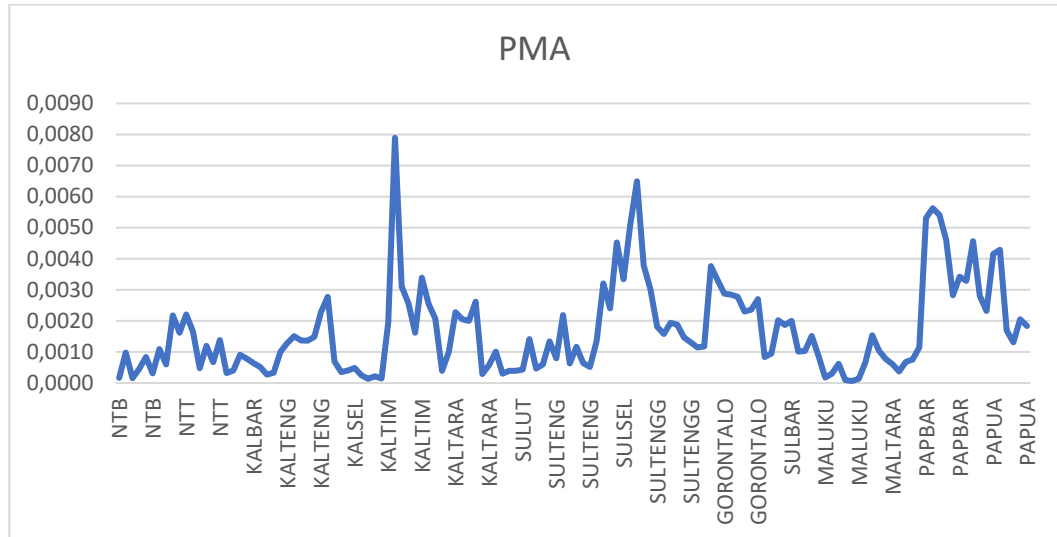
ada beberapa juga yang mengalami penurunan. Ketimpangan pendapatan yang tinggi di provinsi ini, adalah salah satu permasalahan dan isu yang bisa menghambat pembangunan ekonomi nasional tidak hanya ekonomi tetapi juga menimbulkan kesenjangan sosial. Ketimpangan antar provinsi ini dapat berpotensi memicu kecemburuan sosial, sosial, konflik, bahkan dapat menimbulkan disintegrasi bangsa jika disparitasnya terlalu tinggi.

Provinsi dengan Gini Indeks tertinggi selama periode 2015-2022 yaitu Provinsi Gorontalo. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat ketimpangan di Gorontalo masih tinggi, hal ini karena beberapa alasan diantaranya pertumbuhan ekonomi di Gorontalo terpusat di wilayah perkotaan dan sektor tertentu saja, tidak merata hingga ke wilayah pedesaan. Akibatnya, penduduk desa yang mayoritas berpenghasilan rendah kurang bisa menikmati hasil pembangunan ekonomi. Selain itu, tingginya tingkat kemiskinan di pedesaan mengindikasikan banyaknya penduduk miskin di Gorontalo, yang menyebabkan distribusi pendapatan menjadi sangat timpang. Di sisi lain, pertumbuhan sektor industri yang lemah berdampak pada rendahnya ketersediaan lapangan kerja formal. Padahal lapangan kerja formal bisa mengurangi tingkat pengangguran dan memberikan penghasilan yang lebih baik. Selain itu, keterbatasan infrastruktur dan minimnya investasi juga menghambat terciptanya lapangan kerja baru yang dibutuhkan untuk menyerap angkatan kerja. Akibatnya, tingkat pengangguran dan setengah pengangguran tetap tinggi. Rendahnya kapasitas SDM berdampak pada minimnya mobilitas sosial. Masyarakat miskin kesulitan meningkatkan

kemampuan dan bersaing dalam mendapatkan pekerjaan yang layak karena terbatasnya akses pendidikan dan pelatihan keterampilan

Sedangkan Provinsi Kalimantan Barat adalah provinsi dengan Gini Indeks paling rendah di antara 17 provinsi. Hal ini disebabkan karena pemerataan kepemilikan lahan dan aset produktif di pedesaan Kalimantan Barat mencegah penumpukan kekayaan hanya pada sekelompok kecil orang.

Adanya globalisasi, tidak hanya keterbukaan perdagangan yang mengalami peningkatan tetapi juga adanya peningkatan keterbukaan finansial seperti Penanaman Modal Asing (PMA) yang merupakan aliran dana dari negara lain yang juga dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di negara berkembang seperti Indonesia. Oleh karena itu, Menurut (Wijayanti & Aisyah, 2022), suatu wilayah yang sedang berkembang, saat demand meningkat, maka demand dan pendapatan akan terdorong dan kemudian investasi juga akan meningkat. Dan sebaliknya, wilayah dengan pertumbuhan yang lambat akan berakibat pada rendahnya permintaan modal untuk investasi ini dikarenakan supply modal yang relatif rendah. Salim dalam (Fatsabit & Yusran, 2019) tujuan adanya transfer modal adalah untuk mendapatkan keuntungan dan manfaat dari pemilik modal.



Sumber: Badan Pusat Statistik

Gambar 1. 2

Perkembangan PMA 17 Provinsi di Indonesia 2015-2022

Dari grafik di atas, perkembangan PMA dari 17 provinsi di Indonesia yang merupakan menunjukkan bahwa Penanaman Modal Asing di 17 provinsi dari tahun ke tahun mengalami kenaikan meskipun ada beberapa juga yang mengalami penurunan.

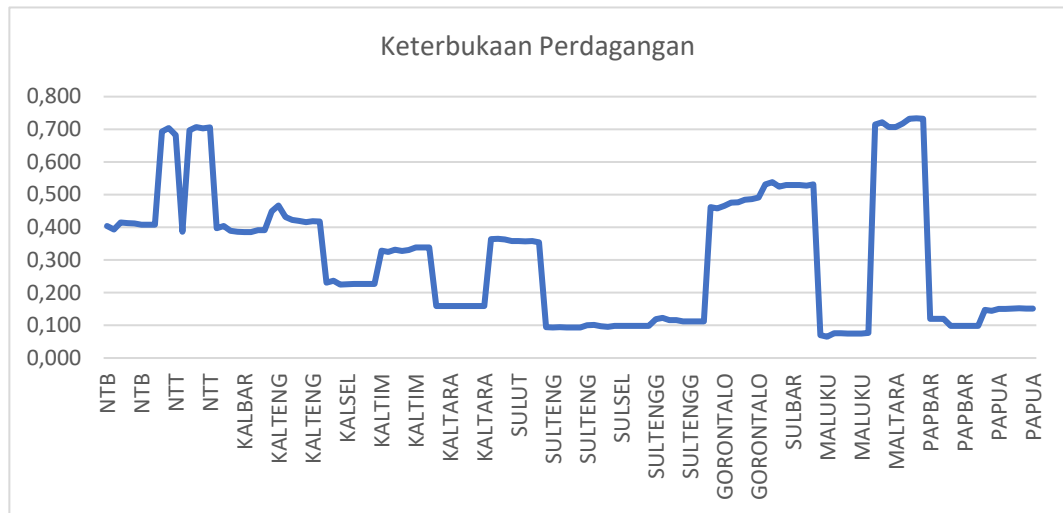
Provinsi dengan Penanaman Modal Asing tertinggi selama periode 2015-2022 yaitu Provinsi Sulawesi Selatan. Hal ini karena Provinsi Sulawesi Selatan merupakan salah satu provinsi yang merupakan Kawasan Indonesia Timur yang maju dibandingkan dengan provinsi Kawasan Indonesia Timur lainnya. Provinsi Sulawesi memiliki letak yang strategis yang berdekatan dengan Selat Makassar yang merupakan jalur perdagangan nasional baik internasional. Selain itu juga infrastruktur di Provinsi Sulawesi Selatan lebih baik seperti Pelabuhan, bandara,

jalan raya, dan fasilitas pendukung lainnya yang akan lebih mudah untuk membuat para investor tertarik karena adanya kemudahan akses.

Sedangkan Provinsi Kalimantan Selatan merupakan provinsi dengan Tingkat Penanaman Modal Asing terendah di antara 17 provinsi. Hal ini disebabkan oleh karena kurangnya infrastruktur yang memadai sebagai penunjang kemudahan akses investor. Selain itu juga, kebijakan pemerintah mengenai kemudahan investasi yang kurang kondusif.

(Dorn et al., 2022a) mengemukakan bahwa ketimpangan pendapatan dipengaruhi oleh keterbukaan perdagangan. Perekonomian Indonesia yang makin terbuka, baik secara *direct* ataupun *indirect*, akan berpengaruh terhadap tingkat perkembangan dan pertumbuhan ekonomi yang berbeda antar provinsi. Tebukanya perdagangan mampu mendorong perkembangan sektor industri manufaktur. Konsentrasi penduduk serta aktivitas ekonomi yang padat di pusat-pusat ekonomi, mampu mendorong industri manufaktur untuk berpindah ke wilayah pinggiran. Hal ini dilakukan untuk menghindari biaya *rent* dan menangani polusi yang mahal di pusat kota. Perpindahan ini menimbulkan aglomerasi ekonomi baru di wilayah pinggiran yang sebelumnya kurang berkembang. Dengan demikian, daerah pinggiran yang tadinya tertinggal dapat mengejar ketertinggalan pertumbuhannya.

Gambar 1. 3
Perkembangan TO 17 Provinsi di Indonesia 2015-2022



Sumber: Bank Indonesia dan Badan Pusat Statistik (2023)

Gambar 1. 4

Perkembangan Keterbukaan Perdagangan 17 Provinsi di Indonesia 2015-2022

Dari gambar di atas, perkembangan keterbukaan perdagangan dari 17 provinsi di Indonesia yang menunjukkan bahwa keterbukaan perdagangan di 17 provinsi dari tahun ke tahun mengalami kenaikan meskipun ada beberapa juga yang mengalami penurunan.

Provinsi dengan keterbukaan perdagangan tertinggi selama periode 2015-2022 yaitu Provinsi Sulawesi Selatan. Hal ini karena Provinsi Sulawesi Selatan merupakan salah satu provinsi yang merupakan Kawasan Indonesia Timur yang maju dibandingkan dengan provinsi Kawasan Indonesia Timur lainnya. Provinsi Sulawesi memiliki letak yang strategis yang berdekatan dengan Selat Makassar yang merupakan jalur perdagangan nasional baik internasional. Karena letak

yang strategis ini, Provinsi Sulawesi Selatan lebih mudah menjalin kerjasama ekonomi dan perdagangan regional. Selain itu juga Provinsi Sulawesi Selatan memiliki produk-produk unggulan untuk diekspor ke negara lain.

Sedangkan Provinsi Kalimantan Timur ialah provinsi yang memiliki tingkat keterbukaan perdagangan paling rendah di antara 17 provinsi. Hal ini disebabkan karena infrastruktur yang ada terbatas yang mana ini digunakan sebagai penunjang kemudahan akses ekspor dan impor. Akses yang sulit secara geografis juga menjadi salah satu penyebabnya. Penyebab yang lain adalah keterbatasan atas ketersediaan produk-produk unggulan yang diekspor ke negara lain, karena Provinsi Kalimantan Timur hanya berfokus dan bertumpu pada sektor perdagangan dan pertambangan.

Tingkat pengangguran terbuka kerap dijadikan tolok ukur kesehatan perekonomian suatu negara atau daerah. Angka pengangguran terbuka yang tinggi mengindikasikan pertumbuhan ekonomi yang lamban atau rendahnya permintaan tenaga kerja. Sebaliknya, rendahnya angka pengangguran terbuka mencerminkan kondisi perekonomian yang baik dan terbukanya lebih banyak peluang kerja. Menurut (Kuncoro & Mudrajad, 1997) penyebab dari pengangguran terbuka di suatu negara atau wilayah adalah proses pembangunan yang lambat dan kesenjangan antar daerah.



Sumber: Badan Pusat Statistik (2023)

Gambar 1. 5

Perkembangan PT 17 Provinsi di Indonesia 2015-2022

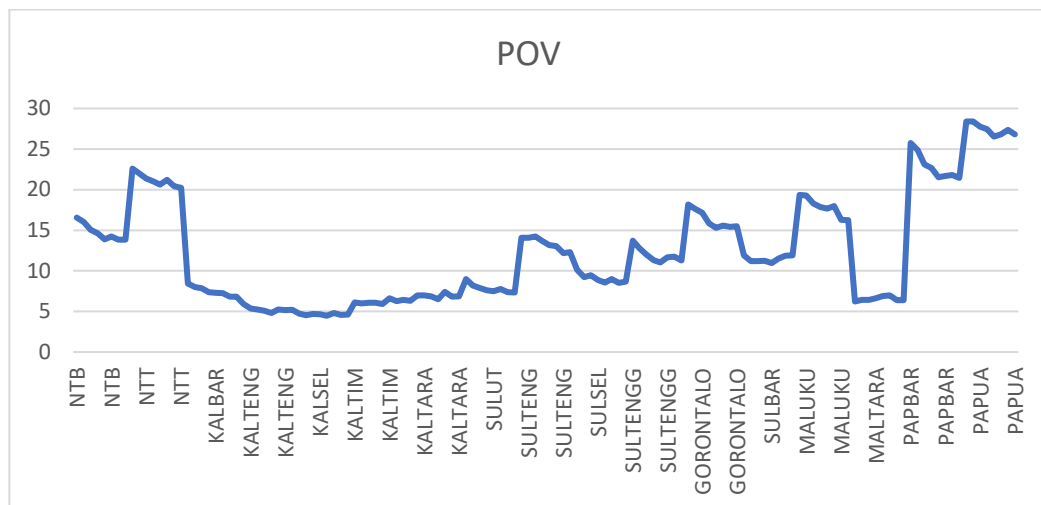
Dari gambar di atas, perkembangan pengangguran terbuka dari 17 provinsi di Indonesia yang merupakan menunjukkan bahwa keterbukaan perdagangan di 17 provinsi dari tahun ke tahun mengalami fluktuasi.

Provinsi dengan tingkat pengangguran terbuka tertinggi selama periode 2015-2022 yaitu Provinsi Maluku. Hal ini karena relatif terbatasnya basis ekonomi di bidang industri dan layanan, yang berdampak pada ketersediaan peluang pekerjaan yang minim. Selain itu juga, kualitas sumber daya manusia di Provinsi Maluku memerlukan peningkatan guna menunjang kebutuhan tenaga kerja lintas sektor. Diskrepansi dalam keahlian bisa berujung pada peningkatan angka pengangguran.

Sedangkan Provinsi Papua merupakan provinsi dengan Tingkat pengangguran terbuka terendah di antara 17 provinsi (Kawasan Indonesia

Timur). Hal ini disebabkan karena banyak warga Papua yang mengambil bagian dalam aktivitas ekonomi tidak resmi seperti bercocok tanam untuk pemenuhan kebutuhan sendiri, berburu, serta berdagang dalam skala kecil. Aktivitas-aktivitas ini, walaupun tidak didokumentasikan secara formal, menyediakan lapangan pekerjaan untuk sejumlah besar orang. Selain itu juga, adanya program transmigrasi yang mengalihkan warga dari daerah berpenduduk padat menuju Papua telah menghasilkan pembentukan pemukiman-pemukiman baru dan membuka peluang pekerjaan dalam bidang agrikultur dan perkebunan. Namun, harus diperhatikan bahwa angka pengangguran rendah tidak otomatis menunjukkan keadaan ekonomi yang positif. Di Papua, banyak masyarakat yang menggantungkan hidup pada sektor informal, dengan tingkat pendapatan dan produktivitas yang tidak memadai.

Kemiskinan merupakan ketidakmampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar untuk bertahan hidup, Tingkat konsumsi digunakan untuk mengukur kemiskinan pada suatu daerah (Kuncoro & Mudrajad, 2003) Kemiskinan adalah isu yang kompleks yang berkaitan dengan berbagai elemen seperti tingkat pendidikan yang tidak memadai, disparitas dalam ekonomi, kekurangan peluang pekerjaan, serta terbatasnya akses ke sumber daya.



Sumber: Badan Pusat Statistik (2023)

Gambar 1. 6

Perkembangan Tingkat Kemiskinan 17 Provinsi di Indonesia 2015-2022

Dari gambar di atas, perkembangan kemiskinan dari 17 provinsi di Indonesia yang merupakan menunjukkan bahwa kemiskinan di 17 provinsi dari tahun ke tahun mengalami fluktuasi.

Provinsi dengan tingkat kemiskinan tertinggi selama periode 2015-2022 yaitu Provinsi Papua. Penyebabnya adalah di Provinsi Papua, fasilitas infrastruktur seperti jalan raya, sarana transportasi, jaringan listrik, dan telekomunikasi masih sangat minim, terutama di wilayah pedalaman. Kekurangan infrastruktur ini membatasi akses masyarakat untuk meraih peluang ekonomi dan menikmati pelayanan publik. Kualitas sumber daya manusia juga masih rendah, tercermin dari tingkat pendidikan dan keterampilan penduduk yang relatif terbatas. Kondisi ini menyulitkan mereka untuk mendapatkan pekerjaan layak dengan penghasilan yang memadai. Selain itu, sebagian besar masyarakat Papua, khususnya yang tinggal di pedalaman, menghadapi kendala

keterbatasan akses terhadap layanan dasar yang dibutuhkan seperti fasilitas kesehatan, pendidikan, serta ketersediaan air bersih yang layak.

Sedangkan Provinsi Kalimantan Selatan ialah provinsi yang memiliki tingkat kemiskinan paling rendah di antara 17 provinsi (Kawasan Indonesia Timur). Hal ini disebabkan karena Provinsi Kalimantan Selatan memiliki sektor industri pengolahan dan pertambangan yang berkembang. Di provinsi ini terdapat pabrik-pabrik pupuk, semen, serta pengolahan hasil pertanian. Selain itu, industri pertambangan batu bara juga tumbuh dan menyediakan lapangan kerja serta pendapatan bagi masyarakat setempat. Kualitas sumber daya manusia tergolong lebih baik jika dibandingkan dengan beberapa daerah lain di Kawasan Indonesia Timur. Tingkat pendidikan dan keterampilan penduduk yang memadai membuka peluang lebih besar untuk mendapatkan pekerjaan layak. Meski demikian, masih ada kantong-kantong kemiskinan di Kalimantan Selatan, terutama di wilayah pedalaman dan pesisir. Upaya pengentasan kemiskinan di daerah-daerah tersebut membutuhkan penanganan langsung dari pemda setempat.

Berdasarkan latar belakang tersebut, kesuksesan pembangunan suatu negara tidak jauh dari masalah ketimpangan. Ketidakmerataan bukan terjadi pada negara berkembang saja tetapi juga pada negara maju. Berdasarkan isu dan fenomena, peneliti ingin lebih jauh melakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh Keterbukaan Perdagangan Terhadap Kawasan Indonesia Timur Tahun 2015-2022.”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan masalah yang telah diidentifikasi sebelumnya, maka masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh keterbukaan perdagangan terhadap ketimpangan pendapatan di Kawasan Indonesia Bagian Timur tahun 2015-2022?
2. Bagaimana pengaruh penanaman modal asing (PMA) terhadap ketimpangan pendapatan Kawasan Indonesia Bagian Timur tahun 2015-2022?
3. Bagaimana pengaruh tingkat pengangguran terbuka terhadap ketimpangan pendapatan Kawasan Indonesia Bagian Timur tahun 2015-2022?
4. Bagaimana pengaruh kemiskinan terhadap ketimpangan pendapatan Kawasan Indonesia Bagian Timur tahun 2015-2022?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian sebagai berikut :

1. Mengidentifikasi pengaruh keterbukaan perdagangan terhadap ketimpangan pendapatan Kawasan Indonesia Bagian Timur tahun 2015-2022?
2. Mengidentifikasi pengaruh penanaman modal asing (PMA) terhadap ketimpangan pendapatan Kawasan Indonesia Bagian Timur tahun 2015-2022?
3. Mengidentifikasi pengaruh tingkat pengangguran terbuka terhadap ketimpangan pendapatan Kawasan Indonesia Bagian Timur tahun 2015-2022?
4. Mengidentifikasi pengaruh kemiskinan terhadap ketimpangan pendapatan Kawasan Indonesia Bagian Timur tahun 2015-2022?

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat:

1. Sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan perdagangan yang memperhatikan aspek pemerataan pendapatan antar wilayah
2. Memberikan kontribusi ilmiah dalam kajian empiris mengenai dampak keterbukaan perdagangan terhadap perekonomian daerah di Indonesia
3. Sebagai rujukan serta perbandingan untuk penelitian berikutnya terkait topik yang serupa